RECANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam,sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Rencana Kerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rencana Kerja ini, mudah-mudah bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Batam, 22 Juli 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Dr. H. GUSTIAN RIAU,SE.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN 2021..... II-1

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam II-10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam II-12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja RKPD II-17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam III-2

3.3 Program dan Kegiatan..... III-7

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM I

BAB V PENUTUP.....V

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap PD Perneriritah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja PD disusun dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan utama Otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan Publik (Public Sevice) dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi (public participation), pemerataan dan keadilan (Equity dan Equality) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung empat misi utama pelaksanaan otonomi daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, yaitu:

1. Mengembangkan Sektor industri dan perdagangan serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang memiliki akses ke pasar global
2. Pengelolaan Sektor Industri, Perdagangan serta Pengawasan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di Kota Batam
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Industri, Perdagangan, Bidang Tertib Niaga dan Bidang Pasar.

Misi Pembangunan di atas merupakan penjabaran Misi Pemerintah Kota Batam di bidang Industri, Perdagangan, Tertib niaga

dan Bidang Pasar. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah sesuai dengan misi di atas, diharapkan Pemerintah Kota memiliki keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan Kota Batam melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran Legislatif dan masyarakat, karena pada era demokrasi ini, masyarakat melalui perwakilannya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan meninjau dari dekat dan secara langsung sejauh mana pemerintah Kota Batam melalui walikotanya sebagai pemimpin wilayah mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang telah memilihnya. Hal ini sesuai dengan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan Kegiatan Pembangunan yang di mulai dari aspirasi masyarakat (Bottom Up) dan perencanaan dinas, sehingga di dapatkan suatu program perencanaan pembangunan yang selaras.

Untuk mencapai hal tersebut di atas maka disusunlah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian,dan Perdagangan, Kota Batam untuk lima tahun kedepan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi dan Misi Walikota Batam. Dan berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tersebut akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahunnya sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan program tahunan yang dijabarkan lebih detail dalam bentuk program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).

12. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan tolak ukur penilaian kinerja serta mencapai harmonisasi perencana pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada tahun 2023.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

- Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2023;
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2023;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berpedoman pada Rencan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.
- Sebagi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN 2021

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam selama tahun 2021 dan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2021 Dengan Jumlah anggaran kegiatan adalah sebesar **Rp 20.651.814.291,00**- (dua puluh milyar enam ratus lima puluh satu delapan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh

satu rupiah). Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan Oktober 2021, maka terjadi perubahan anggaran menjadi **Rp 18.176.982.274,00,**- (delapan belas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan serapan anggaran sebesar **Rp 16.633.275.644**,**00**- (*enam belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*) atau 91.51%.

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7):(6)	9	(10) = (5)+(7)	(11) = (10):(4)*100 %
3,3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik**	**50,94%**		**20,75%**	**21%**	**100%**	**24,53%**	**36,09**	**70,85**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau direvitalisasi**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas**	**100%**		**40%**	**40%**	**100%**	**50%**	**60,00%**	**60,00%**

3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan**	**1000 (Juta $)**		***850 (juta $)***	***850 (juta $)***	**100%**	**900 (juta $)**	**1.809*(juta $)***	**180,90%**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti**	100%		0%	0%	0%	16,67%	0,00%	0,00%
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	160 Pelaku Usaha		0	0	0	0	NA/	NA/
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Peningkatan Tertib Ukur**	**37,51%**		**4,63%**	**3,04%**	**65,66%**	**5,14%**	**11,80%**	**31,46%**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	95,00%		85,00%	85,92%	101%	87,00%	168,96%	177,85%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23		17,5	17,183	98%	18,4	8,626	37,50%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1,5		200	200	100%	91,90%	450	30,00%
3,31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang		53 Orang	53 Orang	100%	56 orang	53 Orang	100%
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya	91 Stel		53 Stel	52 Stel	98%	0	52stel	98%
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.31.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	11 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	100%
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
3.31.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	72 Unit		72 Unit	72 Unit	100%	72 unit	72 unit	100%
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota**	**9,05%**		**8,50%**	**9,19%**	**108%**	**8,60%**	**17,22%**	100%
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan**	70,00%		40,00%	13,39%	33,48%	45,00%	52,19%	74,56%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai berikut :

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
				Tahun n-² (2021)	Tahun n-¹ Tahun 2022	Tahun 2023 tahun n	Tahun n-¹ 2024	Tahun n-² (2021)	Tahun n-¹ 2022	Tahun n 2023	Tahun n-¹ 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan			1,60%	2,40%	2,95%	3,50%	5,67%	N/A	2,95%	3,50%	Persen	
2	Pertumbuhan jumlah IKM			8,50	8,60	8,70	8,80	9,19%	1,00%	8,70	8,80	Persen	
3	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)			55,00	60,00	65,00	68,00	57,38%	25,00%	65,00	68,00	Persen	
4	Pertumbuhan produksi IKM			2,00	3,00	4,00	5,00	2,93	0,75%	4,00	5,00	Persen	
5	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			<7%	<6%	<6%	<5%	<1%	<5%	<6%	<5%	Persen	
6	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang PerindustrianEnergi dan Sumber Daya Mineral;
c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strengths)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik

4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang Industri dan Perdagangan
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya

- **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang baik
3. Adanya Badan Pengelolaan Pulau Batam
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perdagangan dan perindsutrian yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi industry dan perdagangan yang belum tergarap secara maksimal

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Batam adalah sebagai berikut :

- *Sektor Perindustrian*
  - Kurang berkembangnya Industri Hilir
  - Belum optimalnya pola kemitraan antara produsen/pemasok bahan baku dengan pengusaha industri hilir
  - Kurang berkembangnya industri sekunder dan pusat pertumbuhan Agroindustri dan Agrokimia.
  - Belum optimalnya industri logam untuk mendukung pembuatan mesin/peralatan pabrik yang menunjang Agroindustri terutama Agroindustri kecil dan rumah tangga.
  - Belum berkembangnya industri barang modal yang mendukung pengembangan sarana prasarana produksi dan distribusi.
  - Belum berkembangnya industri penunjang, khususnya industri komponen untuk tujuan ekspor serta perusahaan-perusahaan rekayasa.
  - Masih rendahnya produktifitas industri terutama industri dalam negeri yang menghasilkan produk bernilai tambah.
- *Sektor Perdagangan Dalam Negeri*
  - Belum berkembangnya sistem perdagangan barang dan jasa yang terintegrasi dengan perdagangan lokal, regional dan global.
  - Belum mantapnya sistem dan mekanisme distribusi barang, terutama kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
  - Masih Tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen dan produk impor untuk pemenuhan kebutuhan sembako di Kota Batam.
  - Produk import yang belum dapat memenuhi kebutuhan kota Batam dan menekan harga di pasar.

- Masih terbatasnya peralatan pendukung kemetrologian dalam rangka tera ulang UTTP.

➢ *Sektor Perdagangan Luar Negeri*

➢ Rendahnya daya saing produk ekspor yang berbasis sumberdaya lokal

➢ Terbatasnya informasi dan promosi produk ekspor.

➢ Belum optimalnya kerjasama ekonomi sub regional dan perdagangan lintas batas

Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perndustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah :

1. Struktur Industri yang tidak seimbang, dimana industri yang berkembang adalah Industri yang bersifat Footloose Industry dan minim keterkaitan dengan Sumber Daya Lokal.
2. Terbatasnya daya dukung Industri Kecil dan Menengah, karena industri yang berkembang bukan dengan Pola Industri Satelit atau saling terkait.
3. Belum tersedianya Infrastruktur Pendukung Pengembangan dan Penelitian Industri. Kawasan Industri Kecil khususnya industri yang berbasis Sumber Daya Kelautan (Maritime) Batam potensial dikembangkan Industri berbasis Maritim mengingat Batam merupakan Daerah Kepulauan.
4. Terbatasnya Fasilitasi Ekspor bagi IKM.
5. Belum berkembangnya Industri Rumah Tangga di daerah Hinterland, sehingga barang hasil industri tersebut belum memenuhi mutu untuk diekspor.
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana di dalam meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.
7. Peraturan dibidang eksport dan import yang belum jelas pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bekas Batam Bintan Karimun

Sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Kota Batam diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada sumber daya manusia industrial dan niaga yang berkualitas. Masyarakat Batam diorientasikan mampu menciptakan dan memanfaatkan

peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri.

Sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan di Kota Batam diarahkan pada rencana strategis, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industrial dan Niaga yang tangguh melalui rekayasa sosial dan teknologi, secara struktural maupun kultural dengan pendekatan partisipatif.
2. Penciptaan iklim usaha dan persaingan yang sehat, melalui peletakan landasan hukum dan peraturan yang konsisten dalam pengaturan, pembinaan serta pengembangan Industri dan Perdagangan.
3. Pengembangan Industri yang berorientasi ekspor dan berdaya saing
4. Pendayagunaan secara optimal potensi Sumber Daya Lokal
5. Pengembangan Industri dan Dagang Kecil Menengah termasuk industri rumah tangga yang berbasis ekonomi rakyat.
6. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber energi terbarukan untuk wilayah hinterland dan tersedianya pilihan bahan bakar selain dari minyak bumi seperti gas dll;
7. Pengembangan sistem pendukung usaha melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas dan kemudahan perizinan di sektor industri dan perdagangan.
8. Pengembangan sistem informasi dan promosi peluang usaha dan potensi investasi industri dan perdagangan melaui peningkatan akses teknologi, akses permodalan, dan akses pasar.
9. Peningkatan koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bersifat aliansi strategis untuk mempercepat laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan secara adil dan berkesinambungan.
10. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan universitas untuk mencari Inovasi Baru bagi Industri Kecil

dan Menengah serta penyediaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan industry yang ada.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dan Rancangan Renja RKPD

Awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPK sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah tabel 2.3. review Renja R K P D Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Ranwal RKPK :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN RANCANGAN RENJA RKPD TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Lokasi	Pagu Indikatif	Program	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Lokasi	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	5	6	7	8	14	5	6	7	8	14	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**21,955,944,752**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**34.319.533.636**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**12,726,773,551**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**28.023.143.686**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		**10,541,133,766**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Batam	**12.708.054.654**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen		10,451,893,766	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Batam	**10.416.548.058**	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		89,240,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Batam	10.273.328.058	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		**52,500,000**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Batam	143.220.000	
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen		52,500,000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Batam	**-**	

3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		**350,762,645**	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Batam	-	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,496,880	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Batam	**467.187.250**	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		126,765,060	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Batam	2.813.000	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		11,013,705	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Batam	141.718.250	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		22,100,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Batam	12.396.000	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		7,200,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Batam	19.350.000	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		180,187,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Batam	7.200.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		**136,500,000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Batam	283.710.000	

3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen		47,250,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Batam	**215.173.000**	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		89,250,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Batam	104.011.000	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		**1,386,277,140**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Batam	111.162.000	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen		3,998,700	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Batam	**1.348.346.346**	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		1,382,278,440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Batam	3.982.500	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		**259,600,000**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Batam	1.344.363.846	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 Persen		39,780,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 Persen	Batam	**260.800.000**	

3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		168,960,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Batam	39.780.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		49,360,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Batam	170.160.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Batam	49.360.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		**75,000,000**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Batam	1.500.000	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	**100%**		**50,000,000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	**100%**	Batam	-	
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	**100%**		50,000,000	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	**100%**	Batam	-	

3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan		**25,000,000**	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	Batam	-	
3.30.02.2.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	**100%**		25,000,000	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	**100%**	Batam	-	
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen		**1,200,000,000**	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	Batam	-	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	50.94 Persen		**1,000,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	50.94 Persen	Batam	**1.181.151.583**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100 Persen		1,000,000,000	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100 Persen	Batam	**999.203.583**	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		**200,000,000**	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	Batam	999.203.583	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	2 kali		100,000,000	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	2 kali	Batam	**181.948.000**	

3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		100,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Batam	89.204.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		**6,649,171,201**	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Batam	92.744.000	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	100 Persen		**6,549,171,201**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	100 Persen	Batam	**12.312.079.000**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100 Persen		200,000,000	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100 Persen	Batam	**12.312.079.000**	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan		6,349,171,201	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Batam	176.709.000	

3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan		**100,000,000**	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Batam	12.135.370.000	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk	**Persen**		50,000,000	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk	**Persen**	Batam	-	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Laporan		50,000,000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Laporan	Batam	-	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan		**305,000,000**	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	Batam	-	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	1000 (juta $)		**305,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	1000 (juta $)	Batam	**727.095.800**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	33.33 Persen		55,000,000	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	33.33 Persen	Batam	**727.095.800**	

3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor unggulan yang dibina	Pelaku Usaha		150,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor unggulan yang dibina	40 Pelaku Usaha	Batam	345.472.500	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yg difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku Usaha		100,000,000	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yg difasilitasi dalam pameran dagang	5 Pelaku Usaha	Batam	285.685.800	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yg dibina	Pelaku Usaha		**1,000,000,000**	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100 Pelaku Usaha	Batam	95.937.500	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.99 Persen		**850,000,000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.99 Persen	Batam	**1.094.762.649**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89 Persen		850,000,000	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89 Persen	Batam	**1.094.762.649**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan ditera ulang	unit		**150,000,000**	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	19400 Unit		846.566.649	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	orang		100,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	Batam	248.196.000	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Mterologi Legal	Unit		50,000,000	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Mterologi Legal	Unit		**-**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2,600,000,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**6.296.389.950**	

3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9.05 Perse n		**2,600,000,000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9.05 Perse n	Batam	**6.296.389.950**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	50 Persen		2.600.000.000	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	50 Persen	Batam	**6.296.389.950**	
3.31.02.2.01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Batam	98.694.200	
3.31.02.2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Batam	1.799.988.100	
3.31.02.2.01. 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		2.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Batam	4.397.707.650	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdapat perubahan anggaran namun Kegiatan-kegiatan tetap dapat dirumuskan menjadi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up yaitu usulan* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2023 KOTA BATAM

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**		**Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota**		
a	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabipaten/Kota**		**Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan**		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pancur Biru Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 100 Orang 2 Hari	Pokir
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kav. Bestari, Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 100 Orang 2 Hari	Pokir
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Purna Yudha, Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 100 Orang 2 Hari	Pokir
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 100 Orang 2 Hari	Pokir
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kec Batam Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 200 Orang 4 Hari	Pokir
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kec. Batu AJi Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Batik 100 Orang 2 Hari	Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di sisi sektor riil, pembangunan sektor industri dihadapkan pada permaslahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal industri secara umum dibagi menjadi dalam tiga kelompok masalah. *Masalah pertama* adalah populasi usaha industri, postur populasi industri kurang kuat karena industri berskala besar dan sedang, padahal usaha industri inilah yang berpotensi mampu memberikan kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kerjanya. *Masalah kedua* menyangkut struktur industri nasional yang belum kokoh dilihat dari (1) penguasaan usaha/pasar; (2) keterkaitan antara industri besar dengan industri kecil dan menengah (IKM); (3) Keterkaitan hulu-hilir. Masalah ketiga menyangkut produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang masih rendah. Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai; (2) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor illegal di pasar domestik; (3) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik; (4) masalah kepastian hukum , dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi. Disamping permasalahan tersebut, industri nasional menghadapi tantangan dari produk-produk luar negeri yang semakin bebas masuk ke pasar domestik. Untuk itu diperlakukan upaya menyeluruh untuk mengamankan pasaran dalam negeri dari serbuan produk-produk yang illegal dan yang tidak memenuhi standar, seta upaya untuk membantu industri nasional meningkatkan daya saingnya baik dari segi harga maupun kualitas. Peran

ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor non migas dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melaui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun demikian, Kebijakan Perdagangan Luar negeri tersebut akan didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untukmenjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera."

Berdasarkan visi tersebut, maka Bapelitbangda Kota Batam mendukung Misi 1, yaitu:

Mewujudkan "Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, melalui Peningkatan Kualitas dan diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis Keunikan dan Keunggulan Wilayah."

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-

faktor kunci keberhasilan (*key success factor)* yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memiliki tujuan sebagai berikut :

"Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat"

3.2.2 Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2016-2021adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan
2. Meningkatnya produktifitas IKM
3. Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat

3.2.3 Strategi

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan ekternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternative-alternative strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Batam terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. **Strategi 1: Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan**

   Kendala dalam distribusi Nasional menjadi salah satu perhatian Kementrian Perdagangan dalam periode lima tahun kedepan karena sangat erat kaitannya dengan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Salah satu yang harus dilakukan untuk menciptakan stabilisasi harga adalah meningkatkan sarana distribusi perdagangan. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

   - Meningkatnya Omzet Pelaku Usaha Perdagangan

     Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Mempercepat realisasi pembangunan pasar induk
- Meningkatkan kualitas pelayanan pasar sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

b. Strategi 2: Meningkatkan Promosi dan Pemasaran perdagangan

Strategi meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, strategi ini merupakan upaya yang kongkrit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Batam, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Omzet Pelaku Usaha Perdagangan

  Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :
- Meningkatkan pembinaan kegiatan ekspor terhadap pelaku produk ekspor unggulan
- Meningkatkan keikutsertaan produk unggulan dalam kegiatan promosi perdagangan tingkat nasional dan internasional

c. Strategi 3: Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplementasiannya

Keberadaan IKM sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Dimana sektor IKM dapat memberi peluang investasi, meningkatkan tabungan domestik, pendukung bagi industry besar, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan serta menumbuhkan kemampuan kemandirian. Namun demikian IKM masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar diantaranya kekurangan modal, tenaga kerja yang tidak terampil, pemasaran yang sulit dan masih

terbatasnya penggunaan teknologi canggih dalam mengembangkan usaha, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam perencanaan pengembangan IKM serta implementasinya, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya produktifitas IKM dalam perekonomian daerah

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Melakukan pendataan kawasan industri dan Sentra IKM di Kota Batam
- Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Batam

d. Strategi 4: Meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah (IKM)

Kementrian Perindustrian terus berupaya meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri, memberikan berbagai kebijakan bagi daerah untuk membantu baik pendampingan maupun peningkatan kompetensi Industri Kecil Menengah. Langkah ini dapat memacu perekonomian Kota Batam terutama ditengah kondisi pandemi saat ini. Sejalan dengan hal tersebut Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Produktifitas IKM dalam perekonomian daerah

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan kualitas kompetensi IKM
- Meningkatkan kegiatan pendampingan dan promosi produk IKM

e. **Strategi 4: Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi produk dan perlindungan Konsumen**

Prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan adalah stabilitas perekonomian, stbilitas perekomonian menciptakan stabilitas harga, karena harga yang stabil mampu menyebabkan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat, sebaliknya ketidakstabilan akan menyengsarakan masyarakat.

Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Kota Batam juga perlu menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan industri dunia usaha yang menghasilkan produk kini semakin meningkat, apalagi dalam era perdagangan bebas pengaturan terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional dan Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemenuhan standar, produk diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, harga barang yang kompetitif, serta memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam penggunaan barang bagi Konsumen. Dalam hal ini kaitannya dengan produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai bentuk peran pemerintah

dalam melidungi masyarakat konsumen. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Pengendalian Harga pada bahan pokok masyarakat

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Melakukan Operasi Pasar melalui bazar sembako murah
- Melakukan Survei monitoring harga secara berkala
- Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melaui program dan Kegiatannya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	2,95%
		Meningkatnya produktifitas IKM	Pertumbuhan jumlah IKM	8,70
			Produktifitas TK IKM (Rp / Orang)	65,00
			Pertumbuhan produksi IKM	4,00
		Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	<6%
		Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (i*nput*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk Rumusan Program & Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**27,216,577,037**				**28,495,308,984**
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	**12,748,054,654**			100 Persen	**12,726,773,551**
3	**30**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 Persen	**10,416,548,058**			100 Persen	**10,603,573,966**
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang/ bulan	10,273,328,058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Orang/ bulan	10,514,333,966
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	143,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	89,240,000
3	**30**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 Persen	**40,000,000**			100 Persen	**55,125,000**

3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	40,000,000			1 Paket	55,125,000
3	**30**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	**467,187,250**			100 Persen	**350,762,645**
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2,813,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	3,496,880
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	141,718,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	126,765,060
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	12,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,013,705
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	19,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22,100,000
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	7,200,000
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	283,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	180,187,000
3	**30**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 Persen	**215,173,000**			100 Persen	**143,325,000**

3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	104,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	49,612,500
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	111,162,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	93,712,500
3	**30**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 Persen	**1,348,346,346**			100 Persen	**1,314,386,940**
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	3,982,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,998,700
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1,344,363,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,310,388,240
3	**30**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi		100 Persen	**260,800,000**			100 Persen	**259,600,000**
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	39,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	39,780,000

3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	170,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	168,960,000
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72 Unit	49,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Unit	49,360,000
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1,500,000
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik		50.94 Persen	**1,181,151,583**			50.94 Persen	**1,200,000,000**
3	**30**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara		100 Persen	**999,203,583**			100 Persen	**1,000,000,000**
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		7 Unit	999,203,583	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	1,000,000,000
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan		2 kali	**181,948,000**			2 kali	**200,000,000**
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	89,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000

3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	92,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas		100 Persen	**12,312,079,000**			100 Persen	**14,163,535,433**
3	**30**	**4**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei		100 Persen	**12,312,079,000**			100 Persen	**14,063,535,433**
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	176,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	200,000,000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2 Laporan	12,135,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	13,863,535,433
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan		1000 (juta $)	**727,095,800**			1000 (juta $)	**155,000,000**
3	**30**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti		33.33 Persen	**727,095,800**			33.33 Persen	**155,000,000**

3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor unggulan yang dibina		40 Pelaku Usaha	345,472,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Pelaku Usaha	55,000,000
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yg difasilitasi dalam pameran dagang		5 Pelaku Usaha	285,685,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		100 Pelaku Usaha	95,937,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Pelaku Usaha	100,000,000
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur		5.99 Persen	**248,196,000**			5.99 Persen	**150,000,000**
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		89 Persen	**248,196,000**			89 Persen	**150,000,000**
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		200 Orang	248,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	100,000,000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**6,296,389,950**				**2,600,000,000**
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		9.05 Persen	**6,296,389,950**			9.05 Persen	**2,600,000,000**
3	**31**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan		50 Persen	**6,296,389,950**			50 Persen	**2,600,000,000**

3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 Dokumen	98,694,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,000,000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	1,799,988,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	500,000,000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	4,397,707,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2,000,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**846,566,649**				**900,000,000**
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur		5.99 Persen	**846,566,649**			5.99 Persen	**900,000,000**
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		89 Persen	**846,566,649**			89 Persen	**900,000,000**
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		19400 Unit	846,566,649	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19400 Unit	900,000,000
								TOTAL	**34,359,533,636**				**31,995,308,984**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *"Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.*

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyusun Rencana Kerja tahun 2023 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Sub Kegiatan :

   Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pembinaan terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya

   Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana DIstribusi Perdagangan

B. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

C. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- Pameran Dagang Nasional
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

D. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasan.

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- Penyidikan Metrologi Legal

E. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembagan, Penyebaran dan Perwilayah Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1 :

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**								**34,359,533,636**		
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**27,216,577,037**		
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**12,748,054,654**		
3	**30**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,416,548,058**		
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	56 Orang /bulan	100 Persen	10,273,328,058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	143,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**40,000,000**		

3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Paket	100 Persen	40,000,000		
3	**30**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**467,187,250**		
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Paket	100 Persen	2,813,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	3 Paket	100 Persen	141,718,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Paket	100 Persen	12,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Paket	100 Persen	19,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	10 Laporan	100 Persen	283,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**1**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**215,173,000**		
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	2 Unit	100 Persen	104,011,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	13 Unit	100 Persen	111,162,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**1**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,348,346,346**		
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Laporan	100 Persen	3,982,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,344,363,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**1**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**260,800,000**		
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Unit	100 Persen	39,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	6 Unit	100 Persen	170,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	72 Unit	100 Persen	49,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Unit	100 Persen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**1,181,151,583**		
3	**30**	**3**	**2**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**999,203,583**		

3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik		50.94 Persen	7 Unit	30.19 Persen	999,203,583	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**3**	**2**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**181,948,000**		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik		50.94 Persen	1 Dokumen	30.19 Persen	89,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik		50.94 Persen	1 Dokumen	30.19 Persen	92,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**12,312,079,000**		
3	**30**	**4**	**2**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**12,312,079,000**		
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas		100 Persen	1 Laporan	60 Persen	176,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas		100 Persen	2 Laporan	60 Persen	12,135,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**727,095,800**		
3	**30**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**727,095,800**		

3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor unggulan yang dibina	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan		1000 (juta $)	40 Pelaku Usaha	925 (juta $)	345,472,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yg difasilitasi dalam pameran dagang	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan		1000 (juta $)	5 Pelaku Usaha	925 (juta $)	285,685,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yg dibina	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan		1000 (juta $)	0 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha	925 (juta $)	95,937,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**248,196,000**		
3	**30**	**6**	**2**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**248,196,000**		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase Peningkatan Tertib Ukur		5.99 Persen	200 Orang	5.43 Persen	248,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**6,296,389,950**		
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**6,296,389,950**		
3	**31**	**2**	**2**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**6,296,389,950**		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		9.05 Persen	1 Dokumen	8.7 Persen	98,694,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		9.05 Persen	1 Dokumen	8.7 Persen	1,799,988,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		9.05 Persen	1 Dokumen	8.7 Persen	4,397,707,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
												TOTAL	**33,512,966,987**		
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**846,566,649**		
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**846,566,649**		
3	**30**	**6**	**2**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**846,566,649**		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase Peningkatan Tertib Ukur		5.99 Persen	19400 Unit	5.43 Persen	846,566,649	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
												TOTAL	**846,566,649**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 adalah:

a. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
b. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 menjadi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam da Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
c. Meningkatkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Batam

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		
										Nasional	Daerah	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**27,216,577,037**				
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	**12,748,054,654**				
3	**30**	**1**	02:02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	**10,416,548,058**				
3	30	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	10,273,328,058				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	143,220,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	02:05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	**40,000,000**				
3	30	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40,000,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	02:06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**467,187,250**				
3	30	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,813,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	141,718,250				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

						Disediakan						
3	30	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,396,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,350,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7,200,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	283,710,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	02:07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	**215,173,000**				
3	30	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	104,011,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	111,162,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	02:08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	**1,348,346,346**				
3	30	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3,982,500				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,344,363,846				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	02:09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 Persen	**260,800,000**				

3	30	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,780,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	170,160,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	49,360,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,500,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 Persen	**0**				
3	**30**	**2**	02:06		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100 Persen	**0**				
3	30	2	02:06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan	0				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**2**	02:07		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100 Persen	**0**				
3	30	2	02:07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8000 Dokumen	0				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	50.94 Persen	**1,181,151,583**				
3	**30**	**3**	02:01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100 Persen	**999,203,583**				
3	30	3	02:01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	999.203.583,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Bahan-bahan kimia (Operasional Pasar)	**1 paket**	**6.528.000,00**				
						Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor		**68.250.000,00**				
						Karcis retribusi pasar	100 pad	68.250.000,00				
						Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	**1 paket**	**46.172.000,00**				
						Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik		**5.650.000,00**				
						Lampu LED 23 (7 pasar)	50 pcs	5.100.000,00				
						Lampu Neon/TL (7 pasar)	25 pcs	550.000,00				
						Belanja jasa tenaga administrasi		**234.000.000,00**				
						Honorarium Petugas Pasar	6 org x 13 bulan	234.000.000,00				
						Belanja tagihan Air		**79.770.000,00**				

						Biaya air	7 pasar	79.770.000,00				
						Belanja tagihan listrik		**258.008.000,00**				
						Biaya Listrik	7 pasar	258.008.000,00				
						Belanja Penambahan Daya		**17.619.200,00**				
						Pasar Tiban Kampung	1 pasar	17.619.200,00				
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		**43.200.000,00**				
						Retribusi Sampah	7 Pasar	43.200.000,00				
						Belanja luran jaminan Kesehatan bagi Non PNS		**12.600.000,00**				
						Asuransi Kesehatan	6 org x 12 Pasar	12.600.000,00				
						Belanja luran jaminan kecelakaan kerja bagi Non PNS		**518.400,00**				
						Jaminan kecelakaan kerja	6 org x 12 Pasar	518.400,00				
						Belanja luran jaminan Kesehatan bagi Non PNS		**1.450.483,00**				
						Jaminan Kematian	6 org x 12 Pasar	1.450.483,00				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		**16.368.000,00**				
						SPPD ke Tg. Pinang	1 paket	16.368.000,00				
						Belanja Modal Mebel		**17.100.000,00**				
						Kursi kerja staf	5 buah	4.600.000,00				
						meja 1/2 biro	5 buah	12.500.000,00				

						Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		**253.394.500,00**				
						Konsultan Pengawasan (Pasar Wan Sri Beni)	1 unit	20.862.300,00				
						Konsultan Perencanaan (Pasar Wan Sri Beni)	1 unit	35.676.700,00				
						Pemeliharaan Gedung Negara (Pasar Wan Sri Beni)	131,5 M²	196.855.500,00				
3	**30**	**3**	02:02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	2 kali	**181,948,000**				
3	30	3	02:02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	89,204,000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Sosialisasi SNI 8182 dan Permendag		89.204.000				
3	30	3	02:02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	92,744,000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Keg. Pelatihan Edukasi Pengelolaan Retribusi Pasar		92.744.000				

3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	100 Persen	**12,312,079,000**				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**4**	02:02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100 Persen	**12,312,079,000**				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	02:02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	176,709,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.497.000				
						Belanja Jasa Kantor		12.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		54.262.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		84.600.000				
						Belanja Modal Personal Computer		14.500.000				
						Belanja Modal Peralatan Personal Computer		9.300.000				
3	30	4	02:02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	12,135,370,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		213.000.000				
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.944.000.000				
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		136.960.000				
						Belanja Pakaian Olahraga		49.650.000				

						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		18.000.000				
						Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		371.200.000				
						Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		240.000.000				
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan		74.640.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16.640.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		71.280.000				
3	**30**	**4**	02:03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kinerja realisasi pupuk	16 Persen	**0**				
3	30	4	02:03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	0				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	02:03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	0				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	1000 (juta $)	**727,095,800**				
3	**30**	**5**	02:01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	33.33 Persen	**727,095,800**				
3	30	5	02:01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor unggulan yang dibina	40 Pelaku Usaha	345,472,500		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangu	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

										Berkualitas dan Berkeadilan	nan Ekonomi.	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.810.500				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		690.000				
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.800.000				
						Belanja Sewa Hotel		14.700.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10.472.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.000.000				
						Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		300.000.000				
3	30	5	02:01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yg difasilitasi dalam pameran dagang	5 Pelaku Usaha	285,685,800		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		17.021.800				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		690.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		30.960.000				

						Belanja Pakaian Batik Tradisional		6.000.000				
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan		6.000.000				
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		2.800.000				
						Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		95.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		127.214.000				
3	30	5	02:01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yg dibina	100 Pelaku Usaha	95,937,500		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.199.500				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		690.000				
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		15.800.000				
						Belanja Sewa Hotel		36.400.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		19.848.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15.000.000				
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.99 Persen	**248,196,000**				

3	**30**	**6**	02:01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89 Persen	**248,196,000**				
3	30	6	02:01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	248,196,000				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		375.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		33.390.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		173.890.000				
						Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain		19.980.000				
						Belanja Modal Alat Timbangan/Biara		9.881.000				
						Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		3.780.000				
						Belanja Modal Mebel		4.900.000				
3	30	6	02:01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2 Unit	0				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**6,296,389,950**				
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9.05 Persen	**6,296,389,950**				
3	**31**	**2**	02:01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	50 Persen	**6,296,389,950**				
3	31	2	02:01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	98,694,200		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

										dan Berkeadilan	Ekonomi.	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		54.070.200				
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		21.384.000				
						Belanja Sewa Hotel		14.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9.240.000				
3	31	2	02:01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1,799,988,100		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		762.600				
						Belanja Bahan-Bahan Kimia		3.750.000				
						Belanja Bahan-Bahan Baku		75.561.000				
						Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel		430.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		78.575.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4.238.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.296.000				

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		15.370.000				
						Belanja Natura dan Pakan-Natura		4.200.000				
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		185.640.000				
						Belanja Pakaian Batik Tradisional		140.000.000				
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		407.200.000				
						Belanja Jasa Tenaga Ahli		137.600.000				
						Belanja Sewa Hotel		309.400.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42.120.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		330.000.000				
						Belanja Modal Mesin Bor		19.460.500				
						Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya		9.887.000				
						Belanja Modal Alat Dapur		21.000.000				
						Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		10.498.000				
3	31	2	02:01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	4,397,707,650		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Bahan-Bahan Kimia		5.966.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		66.907.250				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.750.000				

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		5.000.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		16.338.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		319.806.000				
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		27.940.000				
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.956.000				
						Belanja Natura dan Pakan-Natura		21.000.000				
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		279.960.000				
						Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH		47.370.000				
						Belanja Pakaian Siaga		236.120.000				
						Belanja Pakaian Batik Tradisional		109.200.000				
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		13.600.000				
						Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		293.500.000				
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan		8.000.000				
						Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		9.000.000				
						Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik		8.000.000				
						Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		475.750.000				
						Belanja Tagihan Air		300.000				
						Belanja Tagihan Listrik		3.960.000				
						Belanja Registrasi/Keanggotaan		9.000.000				
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		52.200.000				

						Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1.191.800.000				
						Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		397.500.000				
						Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar		345.000.000				
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		386.539.000				
						Belanja Modal Alat Pendingin		20.254.000				
						Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		11.247.000				
						Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		22.744.400				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**846,566,649**				
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.99 Persen	**846,566,649**				
3	**30**	**6**	02:01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89 Persen	**846,566,649**				
3	30	6	02:01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	19400 Unit	846,566,649				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Belanja Bahan-bahan Bangunan dan konstruksi		**14.162.000,00**				
						Belanja Bahan Pelaksanaan Metrolofgi	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	14.162.000,00				
						Belanja Bahan-bahan kimia		**1.734.000,00**				
						Belanja Alat Pembersih/Kebersihan Kantor	1 Gedung	1.734.000,00				

						Belanja Suku Cadang - suku cadang alat bengkel		**5.560.000,00**				
						Selang Flesibel	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	5.560.000,00				
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-alat tulis Kantor		**34.062.200,00**				
						Belanja untuk kegiatan kantor	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	34.062.200,00				
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover		**5.652.500,00**				
						Belanja Kertas	105 rim	5.652.500,00				
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos		**2.500.000,00**				
						Materai	250 lembar	2.500.000,00				
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor		**8.892.000,00**				
						Tenda Lipat	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	8.892.000,00				
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor		**9.408.000,00**				
						Tinta Printer	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	9.408.000,00				
						Belanja Alat Pembersih/Kebersihan Kantor		**7.302.000,00**				

						alat kebersihan kantor	1 gedung	7.302.000,00				
						Belanja Komponen-komponen Rambu-rambu		**854.000,00**				
						Corong Speaker	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	854.000,00				
						Honorarium Tenaga Honor UPT Metrologi Legal		**278.850.000,00**				
						Honorarium Tenaga Honor UPT Metrologi Legal	7 orang x 13 bulan	278.850.000,00				
						Belanja Jasa Iklan/Reklame		**7.000.000,00**				
						Jasa iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	7.000.000,00				
						Belanja Tagihan Telepon		**2.997.000,00**				
						Biaya Telepon	1 Gedung	2.997.000,00				
						Belanja Tagihan Air		**4.200.000,00**				
						Biaya Air	1 Gedung	4.200.000,00				
						Belanja Tagihan Listrik		**78.000.000,00**				
						Biaya Listrik	1 Gedung	78.000.000,00				
						Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		**1.800.000,00**				
						Harian Lokal	12 bulan	1.800.000,00				
						Belanja Kawat/Faksmili/Internet/TV Berlangganan		**1.500.000,00**				

						Biaya internet	12 bulan	1.500.000,00				
						Belanja Paket Pengirirman		**28.000.000,00**				
						Biaya Pengiriman kargo	280 kg	28.000.000,00				
						Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		**14.700.000,00**				
						Premi Asuransi Kesehatan	7 orang x 12 bulan	14.700.000,00				
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		**617.760,00**				
						Jaminan Kecelakaan Kerja	7 orang x 12 bulan	617.760,00				
						Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN		**1.701.389,00**				
						Jaminan Kematian	7 orang x 12 bulan	1.701.389,00				
						Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		**66.700.000,00**				
						Kendaraan Roda empat	2 unit/tahun	66.700.000,00				
						Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		**10.710.000,00**				
						Kendaraan Roda Dua	3 unit/tahun	10.710.000,00				
						Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat ukur-Lata Kalibrasi		**9.862.000,00**				
						Biaya Kalibrasi	111 unit	9.862.000,00				
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		**6.100.000,00**				
						Pemeliharaan AC	10 unit	6.100.000,00				

						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadaman Kebakaran		**1.750.000,00**				
						Tabung Pemedam Kebakaran	5 unit	1.750.000,00				
						Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		**35.624.000,00**				
						Gedung Bertingkat	146 m²	35.624.000,00				
						Belanja Pemelihraan Bangunan Gedung tempat Kerja		**30.698.000,00**				
						Pekerjaan Instalasi Listrik	20 titik	30.698.000,00				
						Perjalanan Dinas Luar Kota		**13.354.000,00**				
						SPPD Lura Kota	1 Paket	13.354.000,00				
						Perjalanan Dinas Dalam Kota		**1.680.000,00**				
						Transportasi laut Belakang Padang	PP	480.000,00				
						Transportasi laut Galang Baru	PP	1.200.000,00				
						Belanja Modal Alat Kantor		**22.260.000,00**				
						Lemari Sliding Door	2 buah	22.260.000,00				
						Belanja Modal Mebel		**10.000.000,00**				
						Kursi Besi	20 buah	10.000.000,00				
						Belanja Modal Allat Pendingin		**21.186.000,00**				
						AC Split	3 unit	21.186.000,00				
						Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya		**32.920.000,00**				
						UPS	10 unit	32.920.000,00				

						Belanja Modal Alat Studio		**15.131.000,00**				
						Camera CCTV	2 Set	15.131.000,00				
						Belanja Modal Komputer		**37.500.000,00**				
						Personal Komputer	2 Unit	37.500.000,00				
						Belanja Modal Peralatan Personal Komputer		**15.400.000,00**				
						Printer	2 unit	6.900.000,00				
						Scanner	1 unitt	8.500.000,00				
							TOTAL	**34,359,533,636**				

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.V Batam Center ; Telp. (0778) 466742, Fax. (0778) 466703
Email: perindag@batam.go.id
Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nomor : 10.a /SK/Perindag/Sekr.3/XII/ 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
TAHUN 2023

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;

b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023
KESATU	:	Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 10 Desember 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Dr. H. GUSTIAN RIAU,SE.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19690830 199212 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA-KERJA (RENJA)DISPERINDAG KOTA BATAM TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS
I.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG TERTIB NIAGA**	

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUNIARTI, ST	19770903 200212 2 010	Kabid Tertib Niaga	Koordinator
2	IDWIN ARIEF PRAMUDYA, SH	19830522 200803 1 001	Kasi Pengawasan Meterologi & Perlindungan Konsumen	Anggota
3	CITRA NURPATRIA, S.Sos	19791213 201101 2 004	Kasi Informasi dan Penyuluhan Perdagangan	Anggota
4	TASFING ARIFIN,S.Kom	19740614 200312 1 007	Kasi Penegakan Hukum	Anggota

II.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERDAGANGAN**			
NO.	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	LENY NURISKAWATY,S.Si,Apt	19780604 200502 2 005	Kabid Perdagangan	Koordinator
2	RAHARDI, S. Kom	19770517 200212 1 008	Kasi Sarana Dsitribusi Perdagangan	Anggota
3	HASBI, SE	19770715 200502 2 005	Kasi Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan	Anggota
4	ABDUL RASYID, S.Sos	19730913 200604 1 016	Kasi Ekspor Impor	Anggota

III.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PASAR**			
NO.	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	ETEK YUSRIL, ST	19660618 198803 1 008	Kabid Pasar	Koordinator
2	ZUL AMRI,SH	19641018 200212 1 003	Kasi Bina Pasar & Sektor Informal	Anggota
3	ERDISON,S.Sos	19680302 199309 1 001	Kasi Pengawasan Pasar	Anggota
4	JOKO SUWIGNYO,ST	19830125 201101 1 003	Kasi Penataan & Pemeliharaan Pasar Rakyat Tradisional	Anggota

IV.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG INDUSTRI**			
NO.	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	JANUAR ARIF KURNIAWAN, SE.MM	19810106 200212 1 004	Kasi Perindustrian dan ESDM	Koordinator
2	SUGENG WIDIGDO,ST	19650908 200003 1 005	Kasi Kerajinan Industri	Anggota
3	RIZQI BARA BRAMASTA. NST, S.Kom	19820728 201001 1 010	Kasi ESDM	Anggota
4	M. BANI SADER NATSIR, ST. M. M	19810904 200904 1 001	Kasi Sarana & Industri	Anggota

Batam, 10 Desember 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Dr. H. GUSTIAN RIAU,SE.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19690830 199212 1 001